

**ANALISIS KONFLIK SERTIFIKAT TANAH HAK KOMUNAL: SUATU
STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ANDALAS

Pembimbing: Prof. Dr. Afrizal, MA

**Oleh
ELFIRA ROZA**

BP.1610812017



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

ABSTRAK

ELFIRA ROZA, 1610812017. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi: Analisis Konflik Sertifikat Tanah Hak Komunal: Suatu Studi di Nagari Koto Baru Simalanggang

Pembimbing: Prof. Dr. Afrizal, MA

Dengan asumsi sertifikat hak atas tanah penting sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan sertifikat tanah massal. Seperti yang tertera dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat tanah diamaknai sebagai surat tanda bukti hak yuridis atas sebidang tanah. Salah satu jenis tanah yang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk disertifikatkan adalah tanah adat milik bersama dengan sertifikat hak komunal. Di Sumatera Barat, ada pro dan kontra tentang sertifikat tanah milik kaum. Bagi yang kontra, sertifikat tanah kaum dikhawatirkan menyebabkan konflik internal kaum.

Penelitian ini tentang konflik sertifikat tanah kaum tersebut dengan fokus pada pengelolaan konflik. Hal ini diketahui dengan menelaah proses pembjuatan keputusan persertifikatan tanah milik bersma, penyimpanan dan pemanfaatan sertifikat milik Bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pensertifikatan tanah hak komunal, penyimpanan, dan pemanfaatannya di Nagari Koto Baru Simalanggang. Adapun tujuan khususnya adalah Mendeskripsikan implementasi program PTSL di nagari Koto Baru Simalanggang, mendeskripsikan status tanah dan dasar pensertifikatan tanah hak komunal, mendeskripsikan proses pembuatan persetujuan sertifikat hak komunal, mendeskripsikan pengelolaan konflik penyimpanan sertifikat hak komunal, mendeskripsikan pengelolaan konflik penggunaan sertifikat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik oleh Randall Collins. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

Dengan meneliti 10 kasus pensirtifikatan tanah kaum di Nagari Koto Baru Simalanggang, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tanah kaum yang disertifikatkan dengan sertifikat hak komunal terbagi dua: tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Pada dasarnya alasan penting pensertifikatan tanah milik bersama adalah pencegahan konflik atas pemilikan tanah. Konflik persertifikatan tanah kaum yang diidentifikasi adalah pertentangan antara anggota kaum tentang nama-nama yang dicantumkan dalam sertifikat. Selain itu, anggota kaum berupaya untuk mencegah konflik dengan malakukan musyawarah dalam pembuatan keputusan pensertifikaatn tanah dan pemanfataan sertifikat. Pengelolaan konflik juga terlihat dalam penyimpanan sertifikat. Untuk menghindari penyalahgunaan, sertifikat disimpan di rumah gadang atau di rumah saudara perempuan yang termuda. Mengenai pemanfaatan sertifikat, kesepakatan adalah sertifikat boeh dijadikan jaminan hutang berdasarkan persetujuan dari nama-nama yang tertera dalam sertifikat.

Kata kunci: Konflik sertikat tanah adat, tanah kaum, sertifikat hak komunal, pemanfaatan sertifikat

ABSTRACT

ELFIRA ROZA, 1610812017. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: Analysis of Conflict of Certificate of Communal Land: A Study in Nagari Koto Baru Simalanggang

Supervisor: Prof. Dr. Afrizal, MA

Based on assumption that land title certificates are important for legal protection of land owners's right, The Indonesian government made a policy of mass land certificates. As stated in Article 32 paragraph 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997, a land certificate is interpreted as a proof of juridical rights to a plot of land. One of the types of land that the Indonesian government encourages to be certified is customary land with communal title. In West Sumatra, there are pros and cons regarding communal land certificate of customary land titles. For those who are contra, it is feared that the land title will cause internal conflict in the kiship group.

This research is about conflict over land titles for these people with a focus on conflict management. This is known by examining the process of making the decision to certify joint-owned land, storing and utilizing the joint property certificate. The purpose of this study is to describe the process of certifying communal land rights, storage and utilization in Nagari Koto Baru Simalanggang. The specific objectives are to describe the implementation of the PTSL program in the village of Koto Baru Simalanggang, describe the status of land and the basis for certifying communal land rights, describe the process of making communal rights certificate agreements, describe the management of conflict management of communal rights certificates, describe the management of conflicts over the use of certificates. The theory used in this research is conflict theory by Randall Collins. The research approach used in this study is a qualitative approach with data collection methods using in-depth interview techniques and document collection.

By examining 10 cases of kinship group land certification in Nagari Koto Baru Simalanggang, from the results of this study it was found that land which was certified with communal title certificates was divided into two: harta pusaak tinggi and harta pusaka randah. Basically, the important reason for the certification of communal land is the prevention of conflicts over land ownership. The conflicts over the certification of clan land identified were conflicts over the names included in the certificates. Clan members try to prevent conflicts over the land titles of these clans by conducting deliberations in making decisions on land certification and the use of certificates. Conflict management is also visible in the certificate store. To avoid misuse, the certificates are kept in the rumah gadang or the house of the youngest sister. Regarding the use of the certificate, the agreement is that the certificate can be used as collateral for debt based on the approval of the names written on the certificate.

Keywords: Conflict of customary land certificates, community lands, communal rights certificates, use of certificates